**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**I.1. Latar Belakang**

 Secara umum konsep gender merupakan tentunya melihat pada peran dan tanggung jawab sebagai perempuan dan sebagai laki-laki terhadap kebiasaan dan kehidupan keluarga serta budaya-masyarakat dimana kita hidup termasuk harapan-harapan yang diinginkan bagaimana harusnya menjadi perempuan dan bagaimana menjadi seorang laki-laki, baik harapan atas sifat-sifatnya, sikap maupun perilakunya (Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak n.d.). Jika kita mendengar tentang kesetaraan gender mungkin saja berpikir tentang hak-hak perempuan atau emansipasi perempuan yang artinya perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama. Keterlibatan laki-laki dalam menciptakan kesetaaan gender itu sangat diperlukan dan juga serta menghargai hak-hak perempuan. Dewasa ini banyak perempuan muda yang sedang bersemangat bekerja namun harus berhenti bekerja dikarenakan menikah, hamil, melahirkan dan mengurus anak. Serta mengurus rumah tangga dipandang sebagai tugas perempuan, peran sebagai ibu dan pekerjaan rumah tangga selalu di bebankan kepada perempuan dan tak hanya itu tak sedikit juga perempuan yang masih mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di alami oleh perempuan yang tentunya itu merupakan bentuk ketidakadilan dalam perempuan.

 Mengenai kekerasan yang di alami oleh perempuan menurut World Health Organization (WHO) dalam penelitian mengenai kekerasan fisik yang di alami perempuan telah mencapai tingkat *epidemic* mempengaruhi lebih dari sepertiga perempuan di dunia kekerasan perempuan berbeda-beda dan dapat meluas serta memasukki semua tingkat pendapatan dalam masyarakat, kemudian kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban (WHO, 2017). Kekerasan seksual pada anak di dunia perlu perhatian dengan serius dari berbagai pihak agar angka kejadian kekerasan dapat berkurang.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) ikut serta dalam menangani permasalahan gender ini menangani ketidakadilan kaum perempuan mereka menciptakan organisasi yang berfokus pada gender. Pemberdayaan perempuan yang di ciptakan organisasi tersebut merupakan *United Nations Women (UN Women), UN* Women bekerja sama dengan tim dalam organisasi PBB lainnya dan bekerja sama dengan para masyarakat menyuarakan perihal hak-hak perempuan, dan untuk memilih berkampanye bebas dari kekerasan (UN Women 2019). Sekretaris Jenderal PBB terhadap resolusi Majelis Umum PBB 63/311. Pada bulan Januari 2006 Sekretaris Jenderal Ban Ki Moon memaparkan laporan A/64/588 yang berjudul ‘Proposal Komprehensif Badan Majemuk untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan’ atau ‘*Comprehensive Proposal for the Composite Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women’* Dalam laporannya, Sekretaris Jenderal Ban Ki Moon menyebutkan bahwa, dibentuknya sebuah entitas baru UN Women akan lebih membantu sistem badan-badan PBB lainnya dalam tanggung jawab mereka untuk berkontribusi mempromosikan gender equality dan pemberdayaan perempuan, entitas baru UN Women harus berusaha untuk mempertegas fokus dan dampak dari kegiatan gender equality dari semua sistem PBB (UN Woman 2019).

 *UN* Women membuat sebuah agensi yang lebih kecil yaitu *UN Women* Goodwill untuk lebih memudahkan dalam mencapai tujuannya mereka membuat program kampanye yang dinamakan kampanye He For She, kampanye ini merupakan kampanye solidaritas untuk memajukan kesetaraan gender yang bertujuan untuk melibatkan laki-laki dan anak laki-laki sebagai agen perubahan untuk mencapai kesetaraan gender dan hak-hak perempuan, dan mendorong mereka untuk terlibat dalam upaya mengakhiri isu-isu terhadap ketidaksetaraan yang dihadapi oleh perempuan dan anak perempuan. He For She *[[1]](#footnote-1)* ini jugamerupakan gerakan solidaritas untuk kesetaraan gender sebuah platform yang tentunya dibuat di mana pria dan anak laki-laki dapat terlibat dan menjadi agen perubahan menuju pencapaian kesetaraan gender. kampanye He For She ini bertujuan untuk menciptakan dan meningkatkan kesetaraan gender serta melindungi hak-hak seluruh perempuan di dunia.

 Pada tanggal 20 September 2014 program He For She ini diluncurkan program ini bergerak secara online maupun offline dan dapat juga di akses melalui ponsel yang tentunya memudahkan setiap orang, komunitas, di desa seluruh dunia tentu saja dapat mengakses platform guna memudahkan bagi audiens global agar ikut berpartisipasi dan menjadi agen perubahan untuk pencapaian kesetaraan gender (He For She, 2018). He For She menyadari bahwa ketidaksetaraan gender bukan hanya terjadi pada perempuan, tetapi peran laki-lakipun sangat berpengaruh untuk meningkatkan kesetaraan gender itu sendiri. Kampanye He For She ini bersifat tidak mengikat. Yang dimaksud tidak mengikat ini yaitu ketika sebuah negara ikut gabung dan berkomitmen dengan kampanye ini melalui *website*  resmi, kampanye ni tidak mengharuskan atau memaksa masyarakat negara tersebut untuk bergabung. Ketika masyarakat dari negara tersebut bergabung itu menandakan bahwa masyarakat tersebut mendukung kampanye ini, tetapi mereka yang tidak bergabung maka hal itu tidak akan membuat mereka mendapatkan sanksi. Pada program ini juga PBB secara langsung menunjuk Emma Charlotte Wattson dia mendedikasikan dirinya untuk memberdayakan perempuan muda dan menjadi wajah untuk kampanye perempuan PBB dan He For She dalam mempromosikan kesetaraan gender(UN Woman 2017). Peresmian kampanye ini diakhiri dengan pidato Emma Watson yang menyatakan bahwa kampanye He For She secara terang-teangan mengajak laki-laki untuk berperan ikut serta dan aktif dalam meningkatkan kesetaran gender di seluruh dunia. Di dalam sebuah kampanye tentunya ada target usia guna memudahkan tercapainya maksud dari kampanye itu sendiri di dalam kampanye He For She ini menargetkan laki-laki dan perempuan dengan usia 16-25 tahun dan memiliki minat pada bidang kemanusiaan serta mau ikut berpartsipasi dalam program demi mewujudkan kesetaraan gender dan meningkatkan pemberdayaan perempuan.

 Di Indonesia sendiri gerakan tersebut merupakan proses yang dimana Presiden Indonesia Jokowi, beliau sudah menjadi duta dalam gerakan He For She dan menjadi salah satu pemimpin negara yang memberikan dukungan secara menyeluruh agar Gerakan He For She dapat disebar luaskan dan diterapkan di Indonesia(’Yulius 2017). Sebagai He For She Champion, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa “Perempuan berperan sebagai separuh dari penggerak pembangunan negara. Sebagai Presiden, saya telah menghimbau dan mengutamakan isu kesetaraan gender karena itu sangat penting untuk mencabut akar penyebab diskriminasi dam mengurangi angka kekerasan.” Hal ini tentunya melihat bahwa komitmen Indonesia untuk menjunjung perubahan yang positif bagi para perempuan tentunya yang menyangkut akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dari pembangunan. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan yang berfokus kepada gender yang tentunya hanya melalui kebijakan, program, dan kegiatan saja tetapi perlu adanya langkah nyata melalui suatu gerakan perubahan aksi dan perubahan pola pikir dan tentunya paradigma dari seluruh struktur masyarakat.

 Langkah aksi melalui kampanye *“*He For She*”* yaitu lain melibatkan partisipasi laki-laki terhadap isu perempuan dan anak.. Sebagai Duta He For She, Presiden RI melalui pernyataan tertulisnya menyatakan tujuannya untuk meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan dan juga memberdayakan perempuan, anak-anak, dan kelompok melalui 3 (tiga) fokus area, yaitu :

1. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan;
2. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) Melahirkan; dan
3. Menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan (kemenpppa 2018).

Di Indonesia sendiri menurut catatan tahunan dari Komnas Perempuan melampirkan hasil menggabungan data kasus yang terjadi ditangani oleh lembaga layanan bagi perempuan korban kekerasan, yang dikelola oleh negara atas data yang terjadi di masyarakat, termasuk lembaga penegak hukum mengatakan bahwa kekerasan tahun 2019 meningkat. Data catatan tahunan memaparkan hasil laporan dan kajian Komnas Perempuan yaitu 2020 dalam datanya menyatakan 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani sepanjang tahun 2019 yang besarannya naik 6% dari tahun sebelumnya (406.178 kasus). Kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan ini terdiri dari: 1). 14.719 kasus yang ditangani oleh 239 lembaga mitra pengadalayanan yang tersebar di 33 Provinsi, 2). 421.752 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama, dan 3) 1.277 kasus yang mengadu langsung ke Komnas Perempuan (Komnas Perempuan 2019).

Komnas Perempuan mencatat data setiap tahunnya dalam tiga aspekyaitu, anah personal / privat: yaitu pelaku merupakan orang yang mempunyai hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) ataupun relasi dekat (pacaran) dengan korban, ranah public / komunitas pelaku dan korban tidak memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, darah ataupun perkawinan dan terakhir merupaka ranah negara artinya pelaku kekerasan merupakan aparatur negara yang sedang dalam kapasitas tugas. Termasuk di dalam kasus di ranah negara merupakan pada peristiwa kekerasan, aparat negara ada di lokasi kejadian namun tidak berusaha untuk menghentikan atau justru membiarkan tindak kekerasan tersebut berlanjut. Seperti yang pernah terjadi pada satu tahun yang lalu, kasus terbanyak berasal di ranah privat / personal. Data dari lembaga pemerintah menyatakan kasus berjumlah 14.719 kasus, yang terjadi dari ranah privat / personal tercatat 75% atau 11.105 kasus, ranah public / komunitas 24% atau 3.602 kasus, dan ranah negara 1% atau 12 kasus. Dari data yang ada dalam Pengadilan Agama sejumlah 421.752 kasus tersebut merupakan kekerasan terhadap istri yang merupakan penyebab perceraian. Dari 3.062 kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah publik dan komunitas, tercatat 58% merupakan kekerasan seksual. Kasus yang tercatat kasus-kasus yang dilaporkan sejumlah 12 kasus. 9 kasus dari DKI Jakarta, antara lain kasus penggusuran, kasus intimidasi kepada jurnalis ketika melakukan liputan, pelanggaran hak administrasi kependudukan, kasus pinjaman online, tuduhan afiliasi dengan organisasi terlarang (Komnas Perempuan 2019).

Adapun di kasus tertinggi kekerasan terhadap perempuan yaitu DKI Jakarta menduduki posisi tertinggi di banding kota lainnya Komnas Perempuan melaporkan pencatatan selama tahun 2020 terjadi 2.461 kasus kekerasan terhadap perempuan di Ibu Kota (’Maria 2021a) . Kekerasan yang terjadi pada perempuan di ranah personal tercatat 2.052 kasus atau dengan 83,38 persen," Komisioner Komnas Perempuan Dewi Kanti menyebutkan saat jumpa pers catatan tahunan secara online yang terdata di Jakarta, Jumat 5 Maret 2021. Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di ranah komunitas pelakunya bukan dari ranah privat misal tetangga atau orang tidak dikenal sebanyak 392 kasus setara 15,93 persen dan 17 kasus pada ranah negara (Maria 2021)

**1.2. Identifikasi Masalah**

 Berdasarkan masalah tersebut, maka penulis mengedintifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme dan isi dari Kampanye global program He For She UN Women?
2. Mengapa Indonesia mendukung Kampanye He For She UN Women?
3. Bagaimana implikasi dari komitmen indonesia dalam mendukung gerakan He For She terhadap kesetaraan Gender Di Indonesia?

**2.1. Pembatasan Masalah**

Penulis akan membatasi penelitian mengingat luasnya penelitian yang akan di bahas, mengenai implementasi dari komitmen Indonesia dalam mendukung gerakan kampanye He For She*.* Penulis akan membatasi dari tahun 2015-2021 dikarenakan kampanye ini dimulai dan masuk ke Indonesia ialah pada tahun 2015, untuk lebih memfokuskan penelitian maka penulis melakukan pembatasan pembahasan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan pada tahun 2015-2021.

**2.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengajukan pertanyaan permasalahan dari objek yang dirumuskan sebagai berikut, **“Bagaimana pemerintah Indonesia mengimplementasikan Program He For She UN Women dalam upaya melaksanakan kesetaraan gender di Indonesia?”.**

**1.3. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

**3.1. Tujuan Penelitian**

1. Agar penulis dan pembaca dapat memahami implementasi program kampanye He For She di Indonesia,

2. Agar penulis dan pembaca dapat memahami faktor-faktor apa saja yang yang menjadi penyebab meningkatnya kekerasan dalam perempuan di Indonesia,

3. Dan, penulis dan pembaca dapat mengetahui sejauh mana upaya negara Indonesia dalam meningkatkan kesetaraan gender serta meningkatkan pemberdayaan perempuan.

**3.2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini ialah untuk memberikan manfaat kepada pembaca dan kontribusi secara praktis maupun teoris dalam perkembangan ilmu Hubungan Iternasional. Hasil dari penelitian diharapkan :

1. Memperluas kajian dalam perkembangan ilmu Hubungan Internasional terlebih pada mahasiswa/i yang tertarik pada isu kesetaraan gender serta menaruh fokus pada kampanye He For She dan pemberdayaan perempuan,
2. Mempeluas pengetahuan penulis dan diharapkan menjadi referensi untuk referensi tambahan serta pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya,
3. Untuk memenuhi salah satu syarat menempuh ujian sarjana Strata 1 (S1) dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional.
1. He for She dalam bahasa indonesia memiliki arti dia (laki-laki) untuk dia (perempuan), arti ini memiliki makna bahwa ada keterlibatan langsung dari laki-laki untuk perempuan. Keterlibatan langsung yang dimaksud di kampanye He for She adalah adanya keterlibatan langsung dari laki- laki untuk meningkatkan kesetaraan gender perempuan. [↑](#footnote-ref-1)